



Filsafat Politik Nizam Al-Mulk Dalam Buku *The Book of Government or Rules For Kings*

Rakha Pratama¹, Rahmat Hidayatullah²

¹²Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir H. Juanda No.95, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412

email: ¹rakha.pratama19@mhs.uinjkt.ac.id, ²rahmat.hidayatullah@uinjkt.ac.id

Abstrak:

*Filsafat politik merupakan cara melihat politik dari segi filsafat, hal ini merujuk pada prinsip dasar dan sistematis mengenai politik yang berhubungan erat negara dan warga serta relevansinya terhadap ilmu politik secara praktis. Pada era kontemporer, telah banyak gagasan politik yang digagas oleh filsuf barat, namun masih sangat minim sekali literatur filsuf muslim bidang politik yang dikaji saat ini. Peneliti menggunakan metode deskriptif analisis dengan pencarian data melalui library research, yang lebih menelaah karya premier Nizam Al-Mulk dalam buku *The Book of Government or Rules for Kings* yang diterjemahkan dari bahasa farsi Iran. Pembahasan filsafat politik Nizam Al-Mulk memiliki implikasi mendasar bagi kekuasaan, etika politik, sistem pemerintahan, dan negara.*

Kata Kunci: Nizam Al-Mulk, Filsafat Politik, Kekuasaan

Abstract:

*Political philosophy is a way of viewing politics from a philosophical point of view, it refers to the basic and systematic principles of politics that are closely related to the state and citizens and its relevance to political science in practice. In the contemporary era, there have been many political ideas that have been challenged by Western philosophers, but there is still a very small amount of Muslim philosopher literature in the political field that is studied today. The researchers used the descriptive method of analysis with data search through library research, which further explored the work of Prime Minister Nizam Al-Mulk in the book *The Book of Government or Rules for Kings* translated from the Iranian farce. The discourse of Nizam Al-Mulk's political philosophy has fundamental implications for power, political ethics, governmental systems, and the state.*

Keywords: Nizam Al-Mulk, Political Philosophy and Power

Pendahuluan

Filsafat sebagai induk dari pengetahuan sampai dewasa kini telah banyak melahirkan cabang-cabang keilmuan baik teoretis maupun praktis yang selalu meningkatkan peradaban manusia dari masa ke masa. Para filosof mengklasifikasikan kedua ilmu tersebut (teoretis dan praktis) berdasarkan pada pengalaman akal mereka. Objek ilmu teoretis berupa entitas fisik dan non-fisik dan tugasnya membangun paradigma keilmuan yang komprehensif. Sementara objek ilmu praktis berfokus pada pengujian tindakan manusia.¹

Filsafat merupakan cabang pengetahuan manusia yang memainkan peran penting dalam membangun peradaban manusia. Al-Kindi mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan mengenai kebenaran pertama yang merupakan penyebab segala kebenaran. Pengetahuan mengenai penyebab pertama yang sesungguhnya disebut "*al-falsafah al-ula*", karena semua bagian filsafat yang lain terkandung di dalam pengetahuan itu. Karena pengetahuan mengenai penyebab lebih mulia dari pengetahuan mengenai akibat, sebab pengetahuan kita telah menyeluruh atas semua yang perlu diketahui hanya bila kita sudah mengetahui pengetahuan menyeluruh mengenai penyebabnya.²

Al-Kindi merumuskan filsafat sebagai jalan menuju pengetahuan. Lebih lanjut filsafat untuk mengetahui hakikat suatu pengalaman batas kemampuan manusia. Tujuan filsafat dalam teori adalah mengetahui kebenaran, serta praktik untuk mengamalkan kebajikan.³

Para filsuf mengklasifikasikan pengetahuan manusia ke dalam dua kategori, yakni pengetahuan teoretis dan pengetahuan praktis. Pengetahuan teoretis digunakan sebagai dalih atas suatu tindakan tetapi hanya untuk mencapai kebenaran. Pengetahuan teoretis mencakup semua yang sekarang kita anggap sebagai sains, dan dalam pandangan Aristoteles, itu mengandung bagian terbesar dari jumlah pengetahuan manusia. Pengetahuan teoretis ini terbagi menjadi tiga: matematika, ilmu alam, dan teologi.⁴ Sedangkan pengetahuan praktis berkaitan dengan tindakan, atau lebih tepatnya dengan bagaimana kita harus bertindak dalam berbagai keadaan,

¹ Mulyadi Kartanegara, *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik* (Bandung: Mizan, 2005), h. 163.

² Ya'qub Ibn Ishaq Al-Kindi, *Fî Al-Falsafah Al-Ûla*, Penerjemah Syihabul Furqon (Sumedang: Yayasan Al-Ma'aarij Darmaraja, 2021), h. 6-7.

³ Abubakar Madani, "Pemikiran Filsafat al-Kindi," *Jurnal Lentera*, Vol. IXX, No. 2 (2015), h. 110.

⁴ Jonathan Barnes, *Aristotle: A Very Short Introduction* (New York: Oxford University Press, 2000), h. 40-41.

dalam urusan pribadi dan publik. Etika dan Politik adalah kontribusi utama Aristoteles pada ilmu praktis.

Klasifikasi pengetahuan praktis Aristoteles berbeda dengan para filsuf muslim seperti Al-Farabi dan Ibn Sina.⁵ Pandangan pertama Al-Farabi yakni pengetahuan praktis merujuk pada *Iḥṣā' al-'Ulūm*, menempatkan pengetahuan praktis di bawah al-'Ilm al-Madani. Dengan demikian, dia tidak hanya menghilangkan ilmu manajemen dari klasifikasi ilmu-ilmu praktis Aristotelian, tetapi dia juga menambahkan fiqh dan kalam ke mata pelajaran yang tersisa dari bidang praktis itu, yaitu etika dan politik. Al-Farabi menempatkan etika dan politik sebagai bagian dari keseluruhan yang hanya dapat diselesaikan dengan hubungan filosofis satu sama lain.

Etika merupakan ilmu yang menyatakan bahwa tujuan dari watak, perilaku dan tindakan. Adapun politik menyelidiki bentuk dan tindakan pemerintah yang dapat memberikan kebaikan dan kebajikan seperti itu di kota dan negara. Al-Farabi menganggap mereka bagian dari al-'Ilm l-Madani karena sisi sosial dan praktisnya, yang harus dengan etika dan politik.

Ibn Sina berbicara tentang klasifikasi dalam buku '*Shifā': al-Madkhal, al-Aqsām, al-Hikma al-Mashriqiyya*, dan *Dānesbnāme*. Dalam '*Uyūn al-Hikma*, ia menyatakan bahwa pengetahuan praktis dibagi menjadi etika, manajemen, dan politik. Pengetahuan praktis bersifat epistemologis dan praktis, karena mencakup mengetahui dan bertindak demi menyempurnakan jiwa. Dengan demikian, sementara tujuan pengetahuan teoretis adalah untuk mengetahui kebenaran, tujuan pengetahuan praktis adalah kebaikan.

Dalam buku *al-Hikma al-Mashriqiyya* tentang logika, Ibn Sina mengungkapkan pandangan umumnya tentang sains. Ia merangkum ilmu-ilmu praktis ke dalam tiga bagian: etika (ilmu yang menyelidiki bagaimana mencapai kebahagiaan hidup ini dan akhirat dalam kaitannya dengan nafs dan keadaannya), manajemen rumah tangga, dan politik, yang keduanya mengakui kewajiban dalam hal hidup bersama.

Ibn Sina mengklasifikasikan pengetahuan praktis dalam *al-Madkhal* sebagai etika individu, politik dan manajemen. Namun dalam *al-Aqsām*, ia menempatkan dua subdisiplin di bawah ilmu yang berkaitan dengan masalah sosial dengan alasan bahwa ia memiliki dua cabang: (1) berurusan masalah kerajaan (*mulk*); (2) tentang kenabian (*nubūwma*) dan hukum ketuhanan (*syar'at*).

Buku *Dānesbnāme* juga memuat tambahan pada klasifikasi Aristoteles. Setelah mendefinisikan pengetahuan praktis sebagai pengetahuan tentang apa yang harus

⁵ Humeyra Ozturan, "The Practical Philosophy of Al-Farabi and Avicenna: A Comparison," *Journal Nazariyat*, Vol. 5, No. 1, (2019), h. 4-6 .

dilakukan di dunia ini dan apa yang diharapkan di dunia lain, Ibn Sina menetapkan bahwa ilmu ini dibagi menjadi etika, manajemen rumah tangga, dan politik.

Filsafat politik merupakan cabang dari pengetahuan praktis yang dijelaskan oleh ketiga filsuf di atas. Filsafat politik merupakan refleksi sistematis tentang sifat dan tujuan kehidupan politik. Pendekatan filsafat politik sebagai disiplin yang berdiri sendiri, bukan dari kebenaran moralitas, melainkan dari ciri-ciri dasar dari kondisi manusia yang membentuk realitas kehidupan politik.

Para filsuf dari masa Yunani Kuno, yang merupakan cikal bakal lahirnya karya filsafat dan politik Plato, hingga saat ini banyak mengkaji dari perspektif filsuf Muslim seperti Ibnu Rusyd, Al-Farabi, Ibnu Miskawaih, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Khaldun dalam pencarian ide dan konsep yang berkaitan dengan moralitas publik dan negara.⁶

Namun ada satu tokoh yang masih jarang sekali ditulis dalam literatur Islam di Indonesia, padahal tokoh ini memiliki gagasan-gagasan politik yang digunakan pada politik kontemporer saat ini. Tokoh tersebut bernama Nizam Al-Mulk, seorang wazir (perdana menteri), cendikiawan, filsuf politik, hakim dan juga panglima perang.⁷ Ia memiliki karya monumental berjudul *Siyasat-nama* atau *The Book of Government or Rules for Kings*, sebagai hadiah dan nasihat untuk sultan Seljuk. Nizam Al-Mulk menjabat selama 30 tahun sebagai wazir, sebagai figur sentral dan pusat pemikiran pengendalian perpolitikan kesultanan Seljuk sampai puncak kejayaan kesultanan.

Ide-ide politik Nizam Al-Mulk tertuang dalam bukunya yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai universal Islam sebagai acuan. Korelasi ide politik Nizam al-Mulk dengan perpolitikan saat ini mencerminkan adanya dinamika yang terus berkembang dalam pemikiran politik. Meskipun pandangan Nizam al-Mulk tentang perempuan dalam politik masih ada dalam sebagian kalangan, banyak negara dan masyarakat modern yang telah mengakui pentingnya kesetaraan gender dalam kepemimpinan politik. Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik telah dianggap sebagai faktor penting untuk mencapai tata kelola yang lebih inklusif dan representatif.

PEMBAHASAN

A. Biografi Nizam Al-Mulk

⁶ Ibnu Rusydi, "Filsafat Politik Islam: Sebuah Pengantar," *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, (2015), h. 110.

⁷ Negin Yavari, "Nezām-Al-Molk," *Encyclopædia Iranica, online edition*, 2015, available at <http://www.iranicaonline.org/articles/nezam-al-molk> (accessed on 16 November, 2022)

Nizam Al-Mulk dikenal sebagai seorang Perdana menteri (wazir), ahli politik, panglima militer, sarjana dan filsuf Muslim yang berpengetahuan luas dan bijaksana. Ia beraliran Sunni - Asy'ariyah, hidup di masa Daulah Abbasiyah. Nama lengkap beliau adalah Abu Ali Husain bin Ali bin Ishaq bin Al-Abbas At-Tusi. Lahir pada tanggal 10 April 1018/ 21 Dzulhijjah 408 H di Nishapur yang masuk dalam wilayah pedesaan Radkan, Kota Thoos, Iran. Nizam wafat pada tanggal 14 Oktober 1092 M /10 Ramadhan 485 H. Nizam Al-Mulk terbunuh dalam perjalanan dari Isfahan menuju Baghdad oleh pemuda yang Ismailiyyah fanatik (syiah). Pemuda tersebut berpura-pura meminta bantuan lalu mendekati Nizam dan menikamnya

Nizam Al-Mulk berkebangsaan Persia dari keluarga middle class. Ayahnya seorang pegawai pemerintah Ghaznawi di Tus, Khurasan.⁸ Nizam Al-Mulk menghabiskan masa kecilnya di kota Thoos. Saat umurnya 11 tahun, dia sudah menghafal al-Quran, kemudian melanjutkan pengembaraan intelektualnya di Thoos, untuk belajar Fiqih dan Hadis.⁹

Ketika Sultan Arslan naik tahta tahun 445 H/ 1062 M dengan saran dari Ali Ibn Shadan, Nizam Al-Mulk ditunjuk menjadi wazir. Sebagai periode perubahan, ini merupakan tantangan yang besar antara gagasan dari pemerintahan Islam dengan politik kekhalifahan.¹⁰

Politik kekhalifahan merupakan suatu praktik dasar bahwa penguasa bebas menentukan kehendak dengan tanpa keraguan untuk bertindak di bawah payung hukum Tuhan berdasarkan ajaran Islam. Hal ini merujuk pada Q.S An-Nisa Ayat 59, Artinya;

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu...”

Letak dasar pemikiran politik tersebut, berproses dari Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah dan Abbasiyah bertransformasi membentuk kerajaan Absolute. Kebangkitan unsur Persia dalam kekuasaan politik pada periode awal Bani Abbasiyah diikuti oleh kebangkitan bertahap institusi politik Persia di bawah

⁸ M. Fikri Amrullah, "Sejarah Peradaban Islam; Madrasah Nizam Al- Mulk", *Jurnal Humanistika* Vol. 5, No. 1, (2019), h. 44.

⁹ Bastian Zulyeno, "Perjalanan Panjang Sastra Persia Menuju Nusantara: Dari Siyāsāt Nāme Sampai Tajussalatin," *Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial*, Vol. 4, No.2, (2015), h. 17.

¹⁰ Rofifa Dhia 'Athifa & Mohammad Ghozali, "Pemikiran Nizam Al-Mulk (1018 M - 1092 M)," *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 18, No. 01, (2018), h. 87.

naungan Samaniyah, Ghaznawid, dan kemudian Saljuq. Nizam Al-Mulk berdiri sebagai salah satu perwakilan dari budaya Persia, dengan bias terhadap pemikiran Islam.

Nizam Al-Mulk berkembang sesuai dengan zaman dan lingkungannya. Keterpengaruhannya kondisi interaksi sosial dan kultur budaya membentuk karakter dan mindset Nizam Al-Mulk sampai menjadi wazir. Lingkup yang berkembang pada saat itu yakni Dinasti Saljuk dari kultur budaya bangsa Turki.. Lambat laun ketika Dinasti Samaniyah dapat dengan mudah dikalahkan oleh dinasti Ghaznawiyah, Saljuk menyatakan kemerdekaan dirinya dan membuat Dinasti baru yang menguasai wilayah yang tadi dikusai oleh Samaniyyah.¹¹ Wilayah Kekuasaan Dinasti Saljuk sangat luas, dari Kashgor (Turki) sampai ke Yerusalem, yang terbagi menjadi lima wilayah bagian, yaitu: Saljuk Besar, Saljuk Kirman, Saljuk Irak, Sarjuk Siria dan Saljuk Rum.¹² Adapun raja yang memerintah dalam Dinasti Saljuk¹³ Sebagai berikut:

1. Seljuq bin Duqaq (1036- 1038)
2. Tugril Beq (1038 - 1063)
3. Sultan Alp Arslan (1063 - 1072)
4. Sultan Maliksyah (1072 - 1092)
5. Sultan Mahmud Maliksyah (1092 - 1094)
6. Sultan Bakiyaruq Bin Maliksyah (1094 - 1105)
7. Sultan Maliksyah II (1105)
8. Sultan Muhammad Tapar alias Mehmed I (1105 - 1118)
9. Ahmad Sanjar (1118 - 1157)

Untuk menjalankan roda kerajaan, para sultan mengangkat wazir untuk mempertahankan dan mengurus wilayah kekuasaannya. Nama-nama wazir yang ada pada Dinasti Saljuk sebagai berikut:

1. Abu Nasr Muhammad bin Manshur al-Kundari, wazir pada masa Sultan Tughrul Bek dan Alp Arselan.
2. Nizam Al-Mulk, wazir pada masa Sultan Malik Syah
3. Sa'ad bin Ali bin Isa, wazir pada masa Sultan Mahmud.
4. Tajuddin Abu al-Ghanayim, wazir pada masa Sultan Sanjar.
5. Ali bin al-Hasan al-Tughra, wazir pada masa Sultan Sanjar.

¹¹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 73.

¹² Yatim, *Sejarah Peradaban Islam...*, h. 75.

¹³ C.E. Boswort, *Dinasti-Dinasti Islam* (Bandung: Mizan, 1980), h. 141.

Nizam Al-Mulk memiliki hubungan baik dengan dua Sultan dari Dinasti Saljuk, yakni Sultan Alp Arselan dan Sultan Maliksyah, yang kedua sultan tersebut menjadi tempat Nizam Al-Mulk mengabdikan dirinya sebagai Wazir Dinasti Saljuk selama 30 tahun.¹⁴ Bahkan saat memerintah sebagai wazir, Nizam juga menjadi komandan perang untuk menaklukkan daerah sasaran dengan kemenangan yang cemerlang.¹⁵

Dinasti Saljuk merupakan bagian dari Daulah Abbasiyah yang berhasil menaklukkan dinasti Buwaihi. Sultan Alp Arselan yang melantik Nizam Al-Mulk sebagai Wazir Dinasti Saljuk. Setelah Sultan Alp Arselan meninggal, maka terjadi kegaduhan mengenai kursi sultan. Nizam Al-Mulk sendiri adalah orang yang berbudaya dan terpelajar.¹⁶

Nizam Al-Mulk berperan penting dalam pembentukan struktur hukum, keuangan dan administratif yang beroperasi pada masa Dinasti saljuk, serta ditiru sampai pada abad 19-an. Stabilitas politik dalam pembangunan infrastruktur sosial ekonomi. Aspek yang paling signifikan dari pendekatan politik Nizam Al-Mulk adalah memberikan uang tunai gratis untuk yayasan dan biaya operasional madrasah di semua kota besar, termasuk nizamiyah di Bagdad. Untuk mengembangkan kelahiran kembali politik, budaya, dan intelektual Sunni, perlu mendidik pejabat dan ulama yang mampu memerangi propaganda Syiah. Karena sayap Syiah ada pada era sebelumnya.¹⁷

Selama menjabat, Nizam Al-Mulk melakukan terobosan kebijakan yang sangat berpengaruh atas kemajuan Dinasti Saljuk. Dalam bidang pendidikan, ia sebagai pelopor pendirian Madrasah "*Nizhamiyah*" Guru besar yang terkenal pada sekolah itu yakni Imam Al-Haramain Al-Juwaini dan Imam Al-Ghazali. Nizam Al-Mulk juga yang membentuk dan menetapkan peran dan tugas secara strategis seperti *mudarris* (staf pengajar yang bertanggung jawab terhadap pelaksana pengajaran), *wa'idh* (penceramah umum madrasah). *Mutawalli al-kuttub* (pustakawan), *muqri'* (pengajar al-qur'an) dan *nubat* (pakar gramatika bahasa arab).¹⁸

¹⁴ Syamruddin Nasution, "Blusukan (Menelisik Gaya Kepemimpinan Nizam al-Muluk)," *Jurnal Miqot*, Vol. XXXVIII No. 1 (2014), h. 242.

¹⁵ Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 2003), h. 282.

¹⁶ Philip K. Hitti, *History of The Arabs From The Earliest Times To The Present* (London: Macmillan Publishers LTD, 1970), h. 477.

¹⁷ Antony Black, *The History Of Islamic Political Thought From The Prophet To The Present* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011), h. 91.

¹⁸ Asep Supriatna, Musyadad, V. F., Latip, A. D. A., Sundulusi, C., & Syach, A. "Konsep Pendidikan Islam Menurut Nizham Al-Mulk Serta Kontribusinya Terhadap Perkembangan

Nizam Al-Mulk mendirikan dua universitas besar di Baghdad dan Nishapur. Yang diajarkan di sana adalah Asy'ariyah, yang kemudian menjadi doktrin resmi dinasti Abbasiyah. Doktrin Sunni dijadikan ciri representasi dari teologi Dinasti Saljuk, dari doktrin tersebut, kaum Asy'ariyah terus menyerang sekte dan doktrin yang tidak sesuai dengan citra diri mereka (*Asy'ariyah*), tidak hanya pada tingkat ideologis semata, tetapi juga pada tingkat politik, sejauh musuh mereka, mewakili pendapat yang mendukung negara atau pemerintah yang memusuhi kekhalifahan Abbasiyah.¹⁹

Nizam Al-Mulk adalah menteri utama dua sultan itu secara bergantian (Sultan Alp Arselan & Sultan Malik Syah). Karya Nizam Al-Mulk yang berbahasa Persia yang merupakan sumber utama untuk mempelajari ide-ide politiknya: *Siyasat Nameh* (Buku tentang Kenegaraan) dan *Dastur al-Wuzara'* (Tingkah Laku Para Menteri) atau lebih dikenal dengan *Wasaya-i Khuwaja* Nizam Al-Mulk (Sila Khuwaja Nizam Al Mulk). Ia dikatakan telah menulis karya lain berjudul *Safar Nameh* (Kitab Perjalanan) yang kini sudah punah.

Dia menulis *Siyasat Nameh* tidak hanya untuk membantu kedua sultan mempertahankan prinsipnya tetapi juga untuk menunjukkan kepadanya bagaimana mengkonsolidasikan, mengatur, dan mengembangkannya. Nizam Al-Mulk berkontribusi pada upaya itu dengan merombak dan merampingkan sistem hibah tanah yang kompleks untuk membayar komandan militer dan dengan memperluas untuk memastikan pasokan pegawai negeri yang kompeten sebuah inovasi pendidikan: lembaga pendidikan tinggi perumahan, atau dikenal sebagai perguruan tinggi atau dalam bahasa Arab '*Madrasah*'.²⁰

Kontribusi Nizam Al-Mulk yang paling berpengaruh pada peradaban dunia direpresentasikan dalam karya yang monumental *Siyasat Nameh* (dalam bahasa Persia). Buku tersebut sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa yaitu, *Siyar Al-Mulk* (Arab) yang diterjemahkan oleh Yusuf Bakar, *Siyasetname* (Turki) diterjemahkan oleh Hasan Ali Yucel Klasikler Dizisi, Turkiye Bankasi 1941, *Siasset Nameh traite De Gouvernement* (Perancis) oleh Charles Schefer, Membre De L'institut 1893, dan terakhir dalam bahasa Inggris *The Book of Government or Rules for Kings* yang diterjemahkan Hubert Darke, Routledge 1960.

Pendidikan Islam di Indonesia," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 11, No.01, (2022), h. 664.

¹⁹ Henry Corbin, *History of Islamic Philosophy* (London: Islam Publications, 1993), h. 119.

²⁰ Sarah Chayes, *Thieves Of State: Why corruption threatens global security* (WW Norton & Company, 2015) Chapter 2.

Ada beberapa buku yang dalam genre "*The Mirror for Princes*" karya yang merefleksikan pemberian nasihat kepada sultan. *Buku Al Abkam Al Sulthaniyah Wa'l Wilayat Al Diniyya (The Ordinances of Governance)* karya Abu Al Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib Al Basri Al Baghdadi Al Mawardi. *Buku Nasihat Al Muluk (Book of Council for Kings)* karya Al Ghazali. *Buku Siraj Al-Mulk* Karya Abu Bakr Muhammad ibn Al-Walid al Fihru al Thurtushi. Mereka hidup semasa dengan Nizam Al-Mulk.

Buku *The Book of Government or Rules for Kings* dipersembahkan oleh Sultan Maliksyah, sebagai nasihat pertimbangan dalam memerintah kerajaan. Buku tersebut terbagi menjadi 2 part terdiri dari 50 chapter, bagian pertama ada 39 chapter, yang muatannya berisi sistem administrasi pemerintahan yakni tata kelola pemerintahan, Pembentukan divisi intelijen, pemungutan pajak, proses rekrutmen pegawai, pengawasan aparatur pemerintahan dan instansi militer sebagai penjaga dan pengawal proses bernegara.

Bagian kedua terdiri dari 11 chapter yang berfokus pada solusi dan langkah yang harus diambil dalam menghadapi ancaman tantangan hambatan dan gangguan (ATHG) seperti pemberontakan dan kesesatan agama dari kelompok sekte tertentu.

Nizam membangun narasi di bukunya dengan memberikan gambaran bagaimana sultan harus memerintah, disertai study case sejarah masa lalu, berbagai anekdot dan pengalaman langsung dari penulis sebagai wazir Dinasti Saljuk. Buku ini menggabungkan kisah kerajaan Imperium Persia dengan sistem kesultanan Islam, sehingga terlihat sekali pengaruh dari Persia yang mewarnai kerajaan Islam yang berbasis pada nilai-nilai universal ajaran Islam.

B. Filsafat Politik Nizam Al-Mulk

1) Pandangan Nizam Al-Mulk Tentang Negara

Membandingkan pemikiran Nizam Al-Mulk dengan para filsuf lain dengan isu sentral yang sama. Filsafat politik sebuah disiplin yang berkaitan dengan kesejahteraan kebajikan manusia, mengkaji tujuan dan karakter moral individu, yang tercermin dalam perspektif politik mereka. kedua, Tentang pendirian dan penyelenggaraan politik kenegaraan.²¹

1. Seorang Raja dipilih oleh Tuhan, sebagai wakil-Nya diberikan kekuasaan dan kebijakan dalam memerintah kerajaannya.

²¹ Ibnu Rusydi, "Filsafat Politik Islam," *Jurnal Risaalah*, Vol. 1, No. 1, (2015), h. 111-112

2. Raja harus menjalankan Sunnatullah, melalui kekuasaannya. Dengan menyelesaikan perselisihan di antara manusia, mendistribusikan keadilan dan mensejahterakan rakyatnya
3. Raja harus mampu mengendalikan kekuasaan dengan otoritas rakyatnya, dengan memerintah tidak boleh lemah dan tidak terlalu keras.
4. Negara yang kuat berdasarkan kepemimpinan rajanya, untuk membangun peradaban dengan dukungan rakyat.

Tabel 1. Pandangan Nizam Al-Mulk Terhadap Negara²²

Kekuasaan adalah suatu konsep yang bertitik tolak dengan masalah kekuatan, legitimasi, persuasi politik, manipulasi, propaganda.²³ Genealogi kekuasaan selalu dipadankan dengan kata "Sosial" dan "Politik", sehingga segala keputusan yang dikeluarkan oleh penguasa bersifat sosial dan politik untuk melanggengkan kekuasaan secara positif dan negatif.²⁴

Aristoteles mendefinisikan Negara sebagai kumpulan masyarakat dan setiap masyarakat dibentuk dengan tujuan demi kebaikan, karena manusia senantiasa bertindak untuk mencapai sesuatu yang mereka anggap baik. Tujuan dibentuknya negara untuk mensejahterakan seluruh warga negara, bukan pada golongan atau individu tertentu.

2) Etika Politik

Keharusan memilih dan mengangkat pemimpin di antara komunitas masyarakat menjadi sangat penting, hal ini serupa dengan posisi kepala (akal) dalam tubuh manusia, pemimpin sebagai sumber dari segala pengendalian dan keharmonisan dalam masyarakat.²⁵

Etika Politik

1. Tidak membolehkan rangkap jabatan atau tugas
2. Tidak boleh mendengarkan pendapat wanita dalam urusan negara dan pemerintah
3. Membatasi kekuasaan militer
4. Mengawasi pemuka agama yang menyimpang
5. Menjamu Duta Besar negara lain dengan baik
6. Menjalankan sistem komando pada militer

²² Nizam Al Mulk, *The Book of Government or Rules for Kings*, Penerjemah Hubert Darke (New York: Routledge, 2002)

²³ Eman Hermawan, *Politik Membela yang Benar (teori, kritik, dan nalar)* (Yogyakarta: klik dan DKN Garda Bangsa, 2001), h. 5.

²⁴ Steven Lukes, *Power; A Radical View* (New York: Palgrave Macmillan, 2005), h. 109.

²⁵ Harun Nasution, *Falsafat dan Mistisisme dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 22-23.

7. Memberikan reward dan punishment terhadap pejabat negara/pemerintah
8. Menjaga diri dari sifat kemarahan dalam mengambil keputusan publik
9. Memberikan ruang pada generasi selanjut, dalam urusan negara dan pemerintah
10. Blusukan dan Open House dengan rakyatnya
11. Selalu menerima keluhan masyarakat tanpa melihat siapa dan dari mana orang itu berasal
12. Memperhatikan kerja Wazir dan para pejabat pemerintahnya
13. Memiliki petugas pengawas di setiap kota dan melaporkan langsung kepada raja
14. Menyenggarakan Upacara dan Acara Kenegaraan
15. Mencontoh tradisi positif raja terdahulu
16. Selalu memverifikasi berita dengan melihat berbagai perspektif

Tabel 2. Etika Politik Nizam Al-Mulk²⁶

Public policy merupakan produk dari penggunaan legitimasi negara baik dalam tataran sosial, militer, politik, hukum dan diplomasi. Objek legitimasi meliputi dunia politik, penguasa dan sistem negara.²⁷ dengan adanya legitimasi dari rakyat, maka penguasa mampu membuat dan bertindak dalam hukum yang dibuat berdasarkan nilai-nilai yang terkandung yang berupa kesadaran, cita hukum, moral, politik dan tujuannya dibentuk suatu negara.²⁸

HAM adalah unsur kedaulatan yang merupakan suatu bentuk kekuasaan mutlak, tertinggi dan tanpa kecuali, sebagian besar merupakan ciri utama suatu negara, namun bukan berarti negara memiliki kesempatan dan kekuasaan penuh dalam segala urusan seluruh penduduk.²⁹

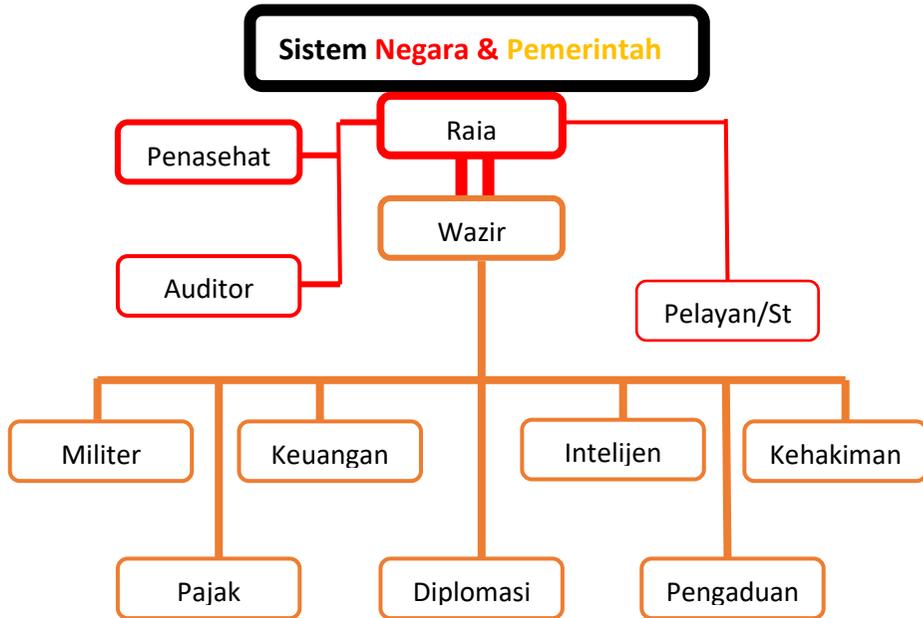
²⁶ Nizam Al Mulk, *The Book of Government or Rules for Kings...*, 2002

²⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2009), h. 93

²⁸ Bambang Hermoyo, "Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan," *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 9, No. 2, (2012), h. 33.

²⁹ Fajrul Ilmy Darussalam & Andi Batara Indra, "Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu," *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 9, No. 2, (2021), h. 192.

3) Sistem Negara dan Pemerintah



Tabel 3. Sistem Negara dan Pemerintah³⁰

Konsep masyarakat dan negara utama menjadi hal yang semua, bila tidak ada pemimpin negara utama dari golongan masyarakat utama. Pemimpin negara utama harus memiliki akal fa'al .

Sudut pandangan agama, alasan mengapa manusia dianggap makhluk sosial, karena manusia sangat bergantung dengan satu sama lainnya. Adanya perbedaan kemampuan individual (bakat, kemampuan dan potensi) membuat manusia bahu membahu untuk memenuhi kebutuhannya secara kolektif dan kolega.

Dari kolektif bersama ini muncul negara sebagai wadah dan sarana hajat umat manusia memenuhi kebutuhan dan melakukan interaksi sosial satu sama lain.³¹ Dalam hal eksekutor, perlu adanya sistem pemerintah untuk menggunakan bakat dan potensi sesuai dengan kemampuannya.

Al Mawardi memandang kepemimpinan negara sebagai alat untuk memelihara agama dan mengatur interaksi sosial dan politik dalam budaya suatu masyarakat, yang keduanya merupakan indikasi eksistensi suatu bangsa

³⁰ Nizam Al Mulk, *The Book of Government or Rules for Kings...*, 2002

³¹ Muhammad Amin, "Pemikiran Politik Al Mawardi," *Jurnal Politik Profetik*, Vol.4, No.2, (2016), h. 124.

dari dimensi kenabian sebagai pembawa *rahmatan lil a'lamin*.³² Sudut pandang pemimpin harus menghormati negara dan agama. Sehingga kepemimpinannya efektif. Sikap Al-Mawardi ini, yang memiliki banyak kesamaan dengan pandangan Nizam Al-Mulk. Al Mawardi lebih memilih menggunakan imam/imamah sebagai pengganti risalah kenabian dalam membela agama dan mengatur urusan publik.³³ Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Imamah dibantu oleh wazirat (para pembantu).

4) Nasehat untuk Raja

Menurut Aristoteles, Manusia adalah *Zoon Politicon* (makhluk yang hidup dalam sosial), hal ini disebabkan karena manusia tidak dapat terlepas dari kehidupan komunitas yakni negara. Monarki apabila kekuasaan berada pada satu orang, dengan tujuan mendistribusikan kebaikan dan kesejahteraan untuk semua. Ini merupakan golongan negara ideal karena kekuasaan di pegang oleh seseorang filsuf yang arif dan bijaksana.

1. Sifat dan Perilaku	<ul style="list-style-type: none"> - Raja harus memiliki banyak sifat positif yang bijaksana, waspada, berani, dan demokratis - Tindakan raja adalah sebagai teladan untuk rakyatnya, sehingga perlunya aspek pengetahuan, keterampilan dan fisik yang baik dan bagus, karena sangat penting untuk kepemimpinan yang sukses. - Sejarah akan mencatat keberhasilan atau kegagalan seorang Raja. - Berprinsip mengambil jalur tengah dalam tindakan dan keputusan, serta mampu menarik simpatik rakyatnya. Karena tindakan selalu mencerminkan penghormatan dan ketaatan. - Peka terhadap sekitarnya.
2. Menguasai pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> - Seorang raja harus memiliki pengetahuan dasar dan wawasan yang lebih, supaya menjadi lebih bijaksana.
3. Bertindak adil dan tidak Diskriminatif	<ul style="list-style-type: none"> - Seorang raja harus menjadi contoh utama dalam memberikan keadilan kepada rakyatnya dan tidak boleh menoleransi perilaku yang tidak adil dari pihak lain.

³² Syamsuddin Ramadhan, *Menegakkan Kembali Khilafah Islamiyah* (Jakarta: Panjimas, 2003), h. 45.

³³ H. A Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 56.

	<ul style="list-style-type: none">- Raja harus memperhatikan kondisi rakyat dan memastikan tindakan positifnya berdampak kepada rakyatnya.
4. Memiliki Teman	<ul style="list-style-type: none">- Raja harus memiliki teman/sahabat yang Good Looking- Teman diposisikan membantu urusan pribadi raja, bukan pada ranah urusan negara/pemerintahan.
5. Berkonsultasi dengan ahli dan mentor	<ul style="list-style-type: none">- Raja harus berkonsultasi terhadap masalah yang ada, namun harus menentukan keputusan dengan cepat dan tepat saat kondisi mendesak.- Menunjuk seseorang yang lebih paham terhadap suatu persoalan, bilamana raja tidak mengerti- Menghargai pendapat orang lain, walaupun lebih tua atau lebih muda dari posisinya

Tabel 4. Nasehat Untuk Raja³⁴

Menurut Plato, negara ideal adalah suatu komunitas etikal untuk mencapai kebajikan dan kebaikan yang dilandaskan dengan pengetahuan. Karena seorang pemimpin harus berpengetahuan yang luas, sistematis, komprehensif.³⁵

Negara tak lain terbentuk sebagai sebuah komposisi antara rakyat dan pengaturnya.³⁶ Konstitusi berkorelasi dari model pemerintahan yang diberlakukan, seperti demokrasi, aristokrasi, oligarki dan monarki.

Tujuan dari manusia bermasyarakat tidak hanya sebagai interaksi sosial saling membutuhkan satu sama lain untuk kebutuhan hidupnya, lebih dari itu untuk mencapai kebahagiaan hidup baik materiil dan spiritual sebagai kebutuhan di dunia bernuansa akhirat.

Untuk mencapai kebahagiaan seutuhnya, setiap warga negara harus berinisiatif untuk selalu siap menyumbangkan segala pikiran dan tenaganya untuk kepentingan semua orang. Dengan demikian, dalam pembangunan suatu bangsa untuk mencapai tujuannya tidak hanya ditopang oleh kebahagiaan individu tetapi juga kebahagiaan umum yang dapat dinikmati oleh setiap masyarakat secara keseluruhan.³⁷

³⁴ Nizam Al Mulk, *The Book of Government or Rules for Kings...*, 2002

³⁵ Malcolm Schofield, *Plato: Political Philosophy* (New York: Oxford Press, 2006), h. 32.

³⁶ Muhammad Fadil, "Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles (Sebuah pengantar filsafat politik klasik)," *Jurnal Kybernan*, Vol. 3, No. 1, (2012), h. 4.

³⁷ Zainal Abidin Ahmad, *Negara Utama* (Jakarta: Kinta, 1968), h 72.

Nizam Al-Mulk sangat menekankan pentingnya mempertahankan kekuasaan dan stabilitas politik atas segalanya, bahkan jika itu berarti menindas hak-hak individu atau kelompok. Pandangan ini bisa berpotensi mengarah pada pemerintahan otoriter dan kurang memperhatikan kesejahteraan rakyat.

Nizam Al-Mulk dianggap sebagai tokoh konservatif yang memperkuat status quo dan kurang inovatif dalam pemikirannya. Keterkaitannya yang erat dengan doktrin-doktrin tradisional dan kecenderungannya untuk mempertahankan struktur sosial yang sudah ada mungkin membuatnya sulit untuk membayangkan solusi baru untuk masalah-masalah politik yang berkembang.

Kesulitan menerapkan prinsip-prinsipnya: Meskipun Nizam Al-Mulk memiliki gagasan yang menarik tentang politik, terkadang sulit untuk menerapkannya secara praktis dalam kehidupan nyata. Mengenai pembagian kewenangan antara kepala negara dan pejabat pemerintah, adopsi sistem negara terlihat jelas. Meskipun sistem politik saat ini menggambarkan "Kontrak Sosial" sebagai hukum yang terbaik yang mengatur negara, dan masyarakat.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Doktrin dari filsafat politik Nizam Al-Mulk memiliki beberapa aspek penting yang dapat diterapkan pada konteks kekuasaan, etika politik, sistem pemerintahan, dan negara. Pertama, dalam kerangka kekuasaan, Nizam Al-Mulk menekankan menjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama otoritas. Dia juga mempertimbangkan moralitas dan kejujuran otoritas ketika mereka menjalankan otoritas mereka. Kedua, dari segi etika politik, Nizam Al-Mulk menyoroti pentingnya keadilan, toleransi, terbuka dalam pengelolaan kekuasaan. Selain itu, ia menekankan pentingnya penegakan hak asasi manusia, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Ketiga, Nizam Al-Mulk menciptakan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat (efektif) dan terstruktur (efisiensi) dengan baik dengan wewenang dan tugas sistem pemerintahan, serta pentingnya reward dan punishment sebagai apresiasi dan motivasi para pejabat. Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan berfokus pada kepentingan internasional.

Dengan demikian, relevansi filsafat politik Nizam Al-Mulk dengan sistem politik kontemporer adalah pentingnya menjaga stabilitas dan kesejahteraan

rakyat sebagai tujuan utama kekuasaan, memperhatikan aspek moralitas dan integritas penguasa, keadilan, toleransi dan toleransi antar golongan, sistem pemerintahan yang kuat dan terstruktur dengan baik, serta menjaga hubungan baik dengan negara tetangga dan mengutamakan kepentingan bersama., memberi jaminan keamanan dan mensejahterakan rakyatnya.

2. Saran

Penulis menyadari bahwa dalam tulisannya terdapat sejumlah kesalahan, baik dalam isi materi, penggunaan bahasa, maupun penyusunan makalah yang kurang tepat. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk meningkatkan pembahasan dalam tulisan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Athifa, Rofifa Dhia & Mohammad Ghozali. 2018. "Pemikiran Nizam Al-Mulk (1018 M - 1092 M)", *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 18, No. 01
- Ahmad, Zainal Abidin. 1968. *Negara Utama*. Jakarta: Kinta.
- Al Mulk, Nizam. 2002. *The Book of Government or Rules for Kings*. Penerjemah Hubert Darke. New York: Routledge.
- Al-Kindi, Ya’qub Ibn Ishaq. 2021. *Fî Al-Falsafah Al-Ûla*, Penerjemah Syihabul Furqon. Sumedang: Yayasan Al-Ma’aarij Darmaraja.
- Amin, Muhammad. 2016. "Pemikiran Politik Al Mawardi", *Jurnal Politik Profetik*, Vol.4, No.2
- Amrullah, M. Fikri. 2019. "Sejarah Peradaban Islam; Madrasah Nidzam Al- Mulk", *Jurnal Humanistika* Vol. 5, No. 1
- Barnes, Jonathan. 2000. *Aristotle: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.
- Black, Antony 2011. *The History Of Islamic Political Thought From The Prophet To The Present*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Boswort, C.E. 1980. *Dinasti-Dinasti Islam*. Bandung: Mizan.
- Chayes, Sarah. 2015. *Thieves Of State: Why corruption threatens global security*. WW Norton & Company.
- Corbin, Henry. 1993. *History of Islamic Philosophy*. London: Islam Publications.
- Darussalam, Fajrul Ilmy. & Andi Batara Indra. 2021. "Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu," *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 9, No. 2
- Djazuli, H.A. 2009. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Fadil, Muhammad. 2012. "Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles (Sebuah pengantar filsafat politik klasik)", *Jurnal Kybernan*, Vol. 3, No. 1
- Hermawan, Eman. 2001. *Politik Membela yang Benar (teori, kritik, dan nalar)*. Yogyakarta: klik dan DKN Garda Bangsa.

- Hermoyo, Bambang. 2012. "Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan", *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 9, No. 2
- Hitti, Philip K. 1970. *History of The Arabs From The Earliest Times To The Present*. London: Macmillan Publishers LTD.
- Kartanegara, Mulyadi. 2005. *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik*. Bandung: Mizan.
- Lukes, Steven. 2005. *Power; A Radical View*. New York: Palgrave Macmillan.
- Madani, Abubakar. 2015. "Pemikiran Filsafat al-Kindi", *Jurnal Lentera*, Vol. IXX, No. 2
- Nasution, Harun. 1995. *Falsafat dan Mistisisme dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nasution, Syamruddin. 2014. "Blusukan (Menelisik Gaya Kepemimpinan Nizam al-Muluk)", *Jurnal Miqot*, Vol. XXXVIII No. 1
- Ozturan, Humeyra. 2019. "The Practical Philosophy of Al-Farabi and Avicenna: A Comparison", *Journal Nazariyat*, Vol. 5, No. 1
- Ramadhan, Syamsuddin. 2003. *Menegakkan Kembali Khilafah Islamiyah*. Jakarta: Panjimas.
- Rusydi, Ibnu. 2015. "Filsafat Politik Islam", *Jurnal Risaalah*, Vol. 1, No. 1
- Rusydi, Ibnu. 2015. "Filsafat Politik Islam: Sebuah Pengantar", *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 1, No. 1
- Schofield, Malcolm. 2006. *Plato: Political Philosophy*. New York: Oxford Press.
- Supriatna, Asep. Musyadad, V. F., Latip, A. D. A., Sundulusi, C., & Syach, A. 2022. "Konsep Pendidikan Islam Menurut Nizham Al-Mulk Serta Kontribusinya Terhadap Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia", *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 11, No.01
- Surbakti, Ramlan. 2009. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Syalabi, Ahmad. 2003. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna Baru.
- Yatim, Badri. 1998. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yavari, Neguin. 2015. "Nezām-Al-Molk". *Encyclopædia Iranica*, online edition. available at <http://www.iranicaonline.org/articles/nezam-al-molk> (accessed on 16 November, 2022)
- Zulyeno, Bastian. 2015. "Perjalanan Panjang Sastra Persia Menuju Nusantara: Dari Siyāsāt Nāme Sampai Tajussalatin", *Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial*, Vol. 4, No.2